



## Rekonsiliasi Dampak Konflik Pilkades dalam Hubungan Sosial di Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan

Afriono Tagaku<sup>1</sup>, Ferdinand Kerebungu<sup>2</sup>, Veronike, E.T. Salem<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: <sup>1</sup>[afriomotagakuafriomotagaku@gmail.com](mailto:afriomotagakuafriomotagaku@gmail.com), <sup>2</sup>[veronikesalem@unima.ac.id](mailto:veronikesalem@unima.ac.id),

<sup>3</sup>[ferdinankerebungu@unima.ac.id](mailto:ferdinankerebungu@unima.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received January 02, 2025

Accepted January 31, 2025

Published March 31, 2025

#### Keywords:

Konflik Pilkades,  
Hubungan Sosial,  
Rekonsiliasi



### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan rekonsiliasi dampak konflik pilkades dalam hubungan sosial di Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif serta hasil penelitian kualitatif menekankan pada makna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa pada tahun 2023 di Desa Lalubi mengalami konflik, dan pemicunya adalah calon yang kalah tidak mengakui kekalahan sehingga mengugat hasil pemilihan kepala desa dan gugatan tersebut dimenangkan sehingga bupati melantik calon kepala desa tersebut. Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait dengan bahaya money politik, pemahaman pesta demokrasi, pemahaman tentang UU dan ketidaktransparannya proses pemilihan, hal inilah yang mengakibatkan konflik antar masyarakat sehingga terjadi konflik yang menimbulkan kesenjangan hubungan sosial antar masyarakat di Desa Lalubi. Langkah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lalubi bersama para tokoh-tokoh lainnya untuk rekonsiliasi dampak pilkades adalah mediasi bagi kedua bela-pihak. Mediasi yang dilakukan melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga terkait, yang memungkinkan dapat menyelesaikan konflik. Proses yang dilakukan ini berfokus pada negosiasi dan kompromi yang mengarah pada solusi yang dapat diterima semua pihak dan mengedepan prinsip - prinsip kekeluargaan serta solusi yang seadil-adilnya.

### Abstract

*The purpose of this study is to describe the reconciliation of the impact of the village head election conflict on social relations in Lalubi Village, East Gane District, South Halmahera Regency. The method used in this study is a qualitative approach and data collection techniques are carried out in a combined manner, data analysis is inductive and the results of qualitative research emphasize meaning. The results of the study show that the village head election in 2023 in Lalubi Village experienced a conflict, and the trigger was that the losing candidate did not admit defeat so that he sued the results of the village head election and the lawsuit was won so that the regent inaugurated the village head candidate. Other factors are the lack of understanding from the community regarding the dangers of money politics, understanding of the democratic party, understanding of the law and the lack of transparency in the election process, this is what causes conflict between communities so that conflicts occur that create gaps in social relations between communities in Lalubi Village. The steps taken by the Lalubi Village community together with other figures to reconcile the impact of the village head election are mediation for both parties. The mediation carried out involves community leaders, village government, and related institutions, which makes it possible to resolve the conflict.*

*The process carried out focuses on negotiation and compromise leading to solutions that are acceptable to all parties and prioritizes the principles of family and the fairest possible solutions.*

**Keywords:** *Pilkades Conflict, Social Relations, Reconciliation.*

## **A. Pendahuluan**

Pemilihan kepala desa merupakan bagian dari prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat yang ada di Desa, yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem pemerintahan daerah. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat ikut serta berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut.

Pada tahun 2022 tahapan pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Halmahera Selatan digelar dua kali tahapan. Tahapan pertama yaitu pada 12 November dan tahap kedua dilaksanakan pada 19 November 2022. Pilkades serentak ini diikuti 558 calon kepala desa di 174 desa dengan partisipasi warga yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 10.668 jiwa, sementara jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan yaitu sebanyak 221.

Diketahui juga bahwa, pelaksanaan Pilkades serentak di Halmahera Selatan ini sempat menyita perhatian warga masyarakat serta sejumlah kalangan karena momentum pesta demokrasi ini menyisakan sengketa yang berujung pada gugatan para konstestan yang mencalonkan diri sebagai Cakades. Adapun dari Pilkades tahapan pertama, tercatat sebanyak 40 gugatan yang diterima Panitia Pilkades ditingkat Kabupaten. Sedangkan tahapan kedua, sebanyak 35 gugatan.

Namun Kehidupan demokrasi di Desa Lalubi dalam konteks pemilihan kepala desa ternyata menimbulkan berbagai problem yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan akar masalahnya. Bahkan meninggalkan benih-benih konflik sosial yang setiap saat bisa terjadi kembali.

Pada tanggal 12 Januari 2023 pelantikan Pilkades, warga Desa Lalubi menolak hasil putusan sengketa pilkades karena disinyalir hak demokrasi tidak diakomodir dalam putusan majelis sidang sengketa, berdasarkan hasil perolehan suara, Cakades nomor urut 3, Rolan Korompis memperoleh 275 suara, selisih 47 suara dengan pemenang ke 2 Cakades nomor urut 1. Kellyon Hulahai yang hanya memperoleh 228 suara.

Maka pasca pemilihan kepala desa terjadi konflik, dikarenakan masyarakat cenderung berkomunikasi dengan orang-orang tertentu yang kemudian melahirkan masyarakat yang tidak mendukung akan penyelenggaraan pemerintah desa. Perbedaan politik dalam pesta demokrasi (Pemilihan Kepala Desa) adalah suatu hal yang wajar, namun masyarakat desa Lalubi belum menyadari akan hal itu, akibatnya dari konflik pilkades di desa Lalubi memperkeruh kondisi sosial Desa Lalubi. Hal ini tentu berimbas/berpengaruh pada rekonsiliasi dampak konflik pilkades dalam hubungan sosial di Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan

Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu tokoh di Desa Lalubi terkait dengan konflik pilkades pasca Pemilihan kepala desa, menyampaikan bahwa “Keadaan masyarakat di desa Lalubi saat ini sudah terbentuk kelompok-kelompok yang pro terhadap kepala desa dan tidak pro terhadap kepala desa. Ini tergambar dari masa sebelum pelantikan bahkan setelah pelantikan kelompok-kelompok ini masih dalam suasana memanas”. Selanjutnya Ia menambahkan “ada sebagian besar masyarakat tidak lagi (tidak mau) berperan, tidak mengambil bagian dalam program-program desa yang di canangkan oleh kades yang dilantik”. Namun ini juga masih bersifat pandangan dari salah satu tokoh yang berada di desa Lalubi yang perlu di teliti lebih jauh. Apabila hal itu benar terjadi, maka sangat disayangkan hubungan sosial di Desa Lalubi

menjadi rusak dan mengakibatkan hubungan masyarakat yang tidak sehat.

Bila dilihat dari persoalan yang terjadi di atas tentunya cukup memprihatinkan dan memerlukan penanganan yang serius serta memerlukan kerjasama yang baik dari setiap tokoh yang ada. Hal ini tidak terlepas dari peneliti sebagai putra daerah yang harus dan berkewajiban untuk dapat meleraikan akan persoalan dampak konflik pilkades yang buruk, sehingga dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang di dukung oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh sebab itu peneliti mencoba meneliti “Rekonsiliasi Dampak Konflik Pilkades Dalam Hubungan Sosial Di Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan”.

## B. Metode

Jenis penelitian dalam studi ini menggunakan metode kualitatif, sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2017), yang menekankan pada penelitian kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, dengan analisis data bersifat induktif dan fokus pada pencapaian makna dalam penelitian.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lalubi, dengan pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan kondisi konflik pilkades tahun 2023 dan belum adanya penelitian sebelumnya di tempat tersebut. Sumber data utama mencakup kata-kata, kalimat, tindakan informan, dan dokumen pendukung, dengan menggunakan teknik purposive sampling sesuai rekomendasi Sugiyono (2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Prosedur pengumpulan data meliputi tiga langkah: laporan diri dengan surat pengantar, pendekatan formal dan informal dengan subjek penelitian, serta pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi pada informan yang telah ditetapkan.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara sistematis sejak awal penelitian, dengan tujuan mengorganisasikan dan menginterpretasikan data untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fokus penelitian.

Teknik keabsahan data mengacu pada Sugiyono (2017), meliputi uji kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability. Metode pengujian mencakup perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, pengecekan kembali, diskusi sejawat, analisis kasus, member check, serta audit menyeluruh untuk memastikan objektivitas dan kepercayaan hasil penelitian.

## C. Results and Discussion

### 1. Result

**a. Apakah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tahun 2023 terjadi perselisihan antar warga?**

**a.** Informan pertama ini adalah seorang Kepala Desa Lalubi atas nama (*Bpk. Kellion Hulahi*)

*“ Ya benar, hal ini disebabkan karena kita (Masyarakat Desa Lalubi) belum memahami demokrasi, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak di inginkan terjadi, misalnya pengerusakan Kantor Desa, hubungan keluarga mulai retak dan lain-lain. Wawancara Kamis, 2 Mei 2024*

b. Informan kedua ini adalah merupakan seorang Ketua BPD Desa Lalubi (**Bpk. Ikhlis Bululung**)

*“Melihat kondisi dari pesta demokrasi pilkades yang ada di desa lalubi tahun 2023 ini, memang ada konflik atau perselisihan antar pendukung, hal ini terlihat jelas dari tatanan sosial yang terjadi antar keluarga yang sudah menutup diri terhadap kelompok-kelompok yang pro dan tidak pro. Artinya bahwa perselisihan dari dampak pilkades ini memang benar terjadi”.* **Wawancara Kamis, 2 Mei 2024**

c. Informan ketiga ini adalah salah satu masyarakat Desa Lalubi (**Bpk. Derlis Tabo**)

*“Didalam pemilihan Kepala Desa di tahun 2023 memang terjadi konflik atau perselisihan antara pendukung karena ada pendustaan demokrasi sehingga masyarakat Desa Lalubi sebagian besar sampai saat ini belum menerima pemilihan yang tidak sesuai prosedur”.* **Wawancara Jumat, 3 Mei 2024**

d. Informan keempat ini adalah Ketua Panitia Pilkades di Desa lalubi (**Bpk. Abraham Ihalewei**)

*“Dalam pemilihan kepala desa, baru pertama kali terjadi perselisihan antar warga. karena Perselisihan ini muncul adanya di saat pemilihan kepala desa yang dimana sebagian besar masyarakat menganggap bahwa di saat pemilihan itu ada pendustaaan demokrasi maka darisitulah timbul perselisihan yang dapat menyebabkan konflik yang ada di desa lalubi.* **Wawancara Sabtu, 4 Mei 2024**

Berdasarkan data hasil penelitian maka dapat dianalisis bahwa konflik di Desa Lalubi pasca-Pilkades 2023 berakar pada pemahaman yang rendah tentang demokrasi dikarenakan kurangnya informasi tentang sosialisasi pemilu di Desa Lalubi, dan kurangnya transparansi dalam proses pemilihan, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang kandidat dan prosedur yang berlaku serta polarisasi yang terjadi antara kelompok-kelompok pendukung. Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga merambah ke ranah sosial, menyebabkan hubungan antar keluarga menjadi retak.

Pemilihan kepala Desa di Desa Lalubi terjadi perselisihan antar pendukung sehingga merubah tatanan sosial antar warga Desa Lalubi menjadi buruk, hal ini dikarenakan masyarakat Desa Lalubi belum dewasa dalam hal perbedaan pendapat dan pilihan politik sehingga menimbulkan reaksi emosional yang berlebihan yang berdampak pada retaknya hubungan kekeluargaan antar masyarakat Desa Lalubi. Dalam proses pilkades terindikasi adanya pendustaan demokrasi dari proses pemilihan yang telah dilakukan oleh calon kepala desa terkait dengan kompetisi politik yang tidak sehat, tidak jujur, tidak adil, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Menurut Bapak/ibu Faktor apa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan antar warga?

a. Menurut informan Kepala Desa Lalubi (**Bpk. Kellion Hulahi**) mengatakan :

*Faktor penyebab terjadinya perselisihan adalah karena saya di lantik meskipun kalah dalam pemilihan, namun kita inikan negara hukum jadi ada jalur-jalur konstitusi untuk menggugat hasil pemilihan. Gugatan yang saya buat di terima sehingga hasil pemilihan yang*

di menangkan oleh Paslon no urut 3 di gugurkan. Gugatan yang saya layangkan atas dasar ketidakadilan dalam berkompetisi atau saya merasa dirugikan dari segi proses pemilihan bahkan pelaksanaan pemilihan yang tidak jujur dan adil”. Inilah hal yang membuatnya terjadi perselisihan antar warga,. **Wawancara Kamis, 2 Mei 2024**

b. Menurut Ketua BPD Desa Lalubi (**Bpk. Ikhlas Bululung**) mengatakan :

“Setiap ada momen politik pasti ada konflik politik. Nah, faktor penyebab yang saya amati sehingga terjadinya perselisihan adalah yang pertama yaitu adanya ketidakakui kekalahan terhadap hasil pemilihan dan yang ke dua adalah money politik dari salah satu calon yang menimbulkan ketidakjujuran dan adil dalam proses pilkades, dan yang ketiga ada orang yang tidak bertanggungjawab mencoba memprofokator masyarakat sehingga hal ini yang menjadi pemicu perselisihan antara calon yang berimbas kepada masyarakat. **Wawancara Kamis, 2 Mei 2024**

c. Menurut (**Bpk. Derlis Tabo**) mengatakan :

“Faktor yang menjadi pemicu perselisihan atara warga yaitu karena masyarakat desa lalubi merasa di rugikan oleh pemerintah daerah yang tidak melantik salah satu calon yang menang, namun melantik calon yang kalah sehingga masyarakat desa lalubi membuat aksi demo di depan kantor desa lalubi, **Wawancara Jumat, 3 Mei 2024**

d. Menurut Ketua Panitia Pilkades di desa lalubi (**Bpk. Abraham Ihalewei**) mengatakan :

“Perselisihan ini muncul karena ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa di saat pemilihan itu ada pendustaaan demokrasi maka darisitulah timbul perselisihan yang dapat menyebabkan konflik, namun kami sudah bekerja secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku. **Wawancara Sabtu, 4 Mei 2024**

Berdasarkan data hasil penelitian maka dapat dianalisis bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab perselisihan antar warga di sebabkan oleh adanya pelantikan terhadap kepala Desa yang kalah dalam pemilihan di Desa Lalubi namun dilantik oleh bupati, Dikarenakan bupati mengetahui bahwa ada politik uang yang terjadi di desa lalubi dan terdapat pelanggaran dan bukti kecurangan pada saat kampanye, sehingga bupati merasa perlu untuk mengambil keputusan untuk melantik cekades yang kalah dalam pemilihan. Hal ini menimbulkan kemarahan dan ketidakpercayaan masyarakat Desa Lalubi kepada pemerintah daerah yang berujung pada aksi demonstrasi di depan kantor Desa Lalubi

Faktor lain juga adalah kompetisi politik yang tidak sehat ditandai dengan maraknya money politik. Money politik terjadi dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit sehingga masyarakat desa lalubi menerima tawaran uang atau barang dari calon, karena masyarakat melihatnya sebagai bantuan langsung untuk kebutuhan sehari hari. Di sisi lain pula tingkat kesadaran politik yang rendah memungkinkan masyarakat mudah dipengaruhi oleh iming-iming materi daripada menilai calon berdasarkan rasionalitasnya.

Hal-hal demikianlah yang menimbulkan ketidakadilan bagi para calon lain. Sehingga calon lain merasa dirugikan dan mengugat hasil pemilihan tahun 2023.

c. **Apakah dengan adanya perselisihan antara warga mempengaruhi hubungan kekeluargaan di Desa Lalubi?**

a. Menurut informan Kepala Desa Lalubi (**Bpk. Kellion Hulahi**) mengatakan:

*“Apabila pertanyaan persilihan ini mempengaruhi hubungan kekeluargaan, maka saya akan mengatakan YA Benar!!, Kenapa demikian? Sebagian besar masyarakat Desa Lalubi saling berkaitan kekeluargaannya, olehnya itu ketika ada persilihan yang terjadi karena fenomena Pilkades ini, keluarga yang pro terhadap saya selaku kepala desa yang di lantik selalu mendukung, namun ada keluarga yang tidak mendukung saya selalu menuduh curang dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kekeluargaan yang terkotak-kotak. Akhirnya dalam hubungan sosial sudah tidak lagi saling menegur-sapa. Wawancara Kamis, 2 Mei 2024*

b. Menurut informan Ketua BPD Desa Lalubi (**Bpk. Ikhlas Bululung**) mengatakan:  
*“Perselisihan yang terjadi jelas sangat berpengaruh terhadap hubungan kekeluargaan, karena hubungan keluarga retak, hal ini kita bisa lihat di kondisi masyarakat saat ini yang terkotak-kotak, komunikasi mereka di batasi oleh kelompok-kelompok yang pro terhadap kepala desa dan kelompok yang tidak pro terhadap kepala desa. Wawancara Kamis, 2 Mei 2024*

c. Masyarakat Desa Lalubi (**Bpk. Derlis Tabo**) mengatakan :

*“Ya karena dengan adanya konflik yang sudah terjadi di desa lalubi maka bisa mempengaruhi hubungan kekeluargaan di desa lalubi menjadi terpecah belah, karena di lihat dari permasalahan konflik yang terjadi di desa lalubi memang banyak masyarakat yang sebagian tidak menerima hasil pemilihan yang tidak netral, Oleh sebab itu bisa terjadi Konflik dan dapat menciptakan ketegangan, kecurigaan, dan perpecahan dalam hubungan keluarga yang sebelumnya harmonis. Wawancara Jumat, 3 Mei 2024*

d. Menurut Ketua Panitia Pilkades (**Bpk. Abraham Ihalewei**) Mengatakan :

*“ YA. Dilihat dari berbagi konflik di desa lalubi memang memang benar karena masyarakat di desa lalubi saat ini sudah terbentuk kelompok-kelompok yang pro terhadap kepala desa dan tidak pro terhadap kepala desa sehingga dapat mempengaruhi kekeluaragaannya. Wawancara Sabtu, 4 Mei 2024*

Berdasarkan data hasil penelitian maka dapat dianalisis bahwa perselisihan dalam konteks pemilihan kepala desa dapat mempengaruhi hubungan kekeluargaan di masyarakat Desa Lalubi. Ketika ada konflik yang terjadi, sebagian masyarakat mendukung kepala desa yang terpilih, sementara sebagian lain merasa curiga dan tidak menerima hasil pemilihan tersebut. Hal ini menyebabkan terbentuknya kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap kepala desa, yang kemudian dapat memecahbelah hubungan kekeluargaan di desa tersebut.

Dampak dari konflik ini terlihat dalam hubungan sosial masyarakat Desa Lalubi yang sudah tidak lagi harmonis. Komunikasi di antara keluarga-keluarga terganggu, ketegangan, kecurigaan, dan perpecahan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menjadi terkotak-kotak dan tidak lagi saling menegur-sapa karena perbedaan dukungan terhadap kepala desa.

Adanya fenomena terpecah belahnya hubungan kekeluargaan ini mengindikasikan bahwa konflik dalam pemilihan kepala desa dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Diperlukan upaya untuk mendamaikan perbedaan pandangan dan merestorasi hubungan kekeluargaan yang telah retak akibat perselisihan politik ini. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat Desa Lalubi dapat kembali hidup dalam harmoni dan kedamaian dalam bingkai kekeluargaan.

**d. Menurut Bapak/ibu apakah perselisihan tersebut dapat diselesaikan?**

a. Menurut Kepala Desa Lalubi (**Bpk. Kellion Hulahi**) mengatakan :

*“Di Desa Lalubi sendiri, baru terjadi dampak pemilihan seperti ini. Persilihan ini dapat di selesaikan, namun butuh waktu yang cukup lama. Karena masyarakat sudah terkotak-kotak (Kubu-kubu) dan juga ada sebagian masyarakat saat ini masih belum menerima hasil putusan terkait dengan pelantikannya saya selaku kepala desa. Hal ini mungkin berakibat pada jalannya pemerintahan yang saya pimpin, namun saya optimis untuk dapat melerai akan konflik/persilihan yang terjadi. Wawancara Kamis, 2 Mei 2024*

b. Ketua BPD Desa Lalubi (**Bpk. Ikhlas Bululung**) mengatakan :

*“Selesai dan tidaknya perselisihan ini sebetulnya tergantung pada diri kita masing-masing, dan semua pasti ada kosekuensinya. Kalau misalnya kita tetap pada pendirian atau ego kita merasa benar maka kosekuensinya perselisihan ini akan tetap ada dan berimbas pada jalannya pemerintah dan masyarakat secara khusus. Wawancara Kamis, 2 Mei 2024*

c. Masyarakat Desa Lalubi (**Bpk. Derlis Tabo**) mengatakan :

*“Dalam kasus seperti ini, penyelesaian perselisihan tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat keinginan kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang adil, dukungan dari pihak-pihak terkait, dan proses penyelesaian sengketa yang tersedia, sehingga upaya mediasi atau negosiasi dapat membantu menyelesaikan konflik. Wawancara Jumat, 3 Mei 2024*

d. Ketua Panitia Pilkades (**Bpk. Abraham Ihalewei**) mengatakan :

*“Memang pasti akan terselesaikan perselisihan ini akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama karena masyarakat desa lalubi sebagian besar belum menerima sepenuhnya pemilihan pilkades yang tidak sesuai prosedur pemilihan. Wawancara Sabtu, 4 Mei 2024*

Berdasarkan data hasil penelitian diatas maka dapat dianalisis bahwa Penyelesaian perselisihan ini tergantung pada keinginan kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang adil, dukungan dari pihak-pihak terkait, dan proses penyelesaian sengketa yang tersedia.

Mediasi atau negosiasi dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara berunding dan mencari kesepakatan bersama yang mengedepankan kepentingan bersama dan prinsip keadilan dalam menyelesaikan perselisihan. Upaya kolaboratif antara dua belah pihak serta dukungan dari pihak terkait diperlukan untuk mencapai penyelesaian yang baik dan berkelanjutan.

**e. Menurut Bapak/ibu apakah ada jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan yang ada?**

a. Menurut informan Kepala Desa Lalubi (**Bpk. Kellion Hulahi**) mengatakan :

*“ Sampai saat ini kami dari Pemerintahan lebih khusus saya selaku kepala desa mencoba beberapa cara, misalnya mencoba berkomunikasi kembali dengan pihak-pihak yang saya anggap berselisih, kemudian cara lain adalah lewat program-program yang di lahirkan harus ada prinsip keadilan, tidak mementingkan pendukung saya, melainkan semua masyarakat yang ada di Desa Lalubi. Wawancara Kamis, 2 Mei 2024*

b. Ketua BPD Desa Lalubi (**Bpk. Ikhlas Bululung**) mengatakan :

*“Kami dari BPD sedang mengupayakan agar perselisihan ini dapat di selesaikan. Upaya yang kami upayakan adalah memposisikan diri sebagai mediator untuk merokonsiliasi persoalan perselisihan ini, dan yang kedua saya juga menyampaikan kepada anggota BPD bahwa kita harus memposisikan diri netral, meskipun saya ketahui bahwa anggota BPD juga ada yang pro terhadap kepala desa bahkan yang tidak pro, namun kita harus profesional dan tau menempatkan posisi sebagai lembaga yang independen. Wawancara Kamis, 2 Mei 2024*

c. Masyarakat Desa Lalubi (**Bpk. Derlis Tabo**) mengatakan :

*“Sebagai masyarakat desa lalubi pendekatan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan tergantung juga pada konteks spesifik dari situasi tersebut. Namun, secara umum, ada beberapa prinsip yang perlukita iikuti sebagai jalan terbaik untuk kita menyelesaikan perselisihan yang terjadi yaitu: kita harus berkomunikasi yang Efektif dan Komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh pengertian ini merupakan pondasi utama untuk menyelesaikan perselisihan. Dan mendengarkan dengan baik serta mengungkapkan pendapat secara jelas, pihak yang terlibat dapat mencari solusi bersama. Wawancara Jumat, 3 Mei 2024*

d. Ketua Panitia Pilkades (**Bpk. Abraham Ihalewei**) mengatakan :

*“Sebab itu kami dari panitia Pilkades akan mencari jalan terbaik untuk desa lalubi. Kami selaku panitia pemilihan Kepala Desa mengupaya mencari solusi terbaik untuk masyarakat desa lalubi yang dimana masyarakat hari ini telah terjadi perselisihan koflik Pilkades di desa lalubi oleh. Wawancara Sabtu, 4 Mei 2024*

Berdasarkan data hasil penelitian diatas maka dapat dianalisis bahwa Pendekatan yang diambil oleh kepala desa dan BPD Desa Lalubi untuk menyelesaikan perselisihan ini yaitu menekankan pada pentingnya komunikasi yang efektif dan terbuka. Dengan berkomunikasi secara jujur dan penuh pengertian, mereka berharap dapat mencapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa komunikasi yang baik merupakan pondasi utama dalam menyelesaikan perselisihan.

Selain itu, Kepala Desa dan BPD Desa Lalubi juga menyadari pentingnya profesionalitas dan netralitas dalam penyelesaian konflik. Meskipun mereka memiliki preferensi masing-masing terhadap pihak yang berselisih, mereka berusaha untuk tetap bersikap netral dan independen sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan dengan adil.

## 2. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rekonsiliasi dampak konflik pilkades dalam hubungan sosial di Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan dengan cara menggali informasi pada setiap informan berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Berikut adalah pembahasan hasil penelitian mengenai dengan rekonsiliasi dampak pilkades dalam hubungan sosial di Desa Lalubi:

1. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Lalubi pada tahun 2023 terjadi perselisihan antar warga.

Penelitian ini menunjukan bahwa konflik di Desa Lalubi pasca-Pilkades 2023 berakar pada pemahaman yang rendah tentang demokrasi, dalam hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pemilu di Desa Lalubi, dan kurang transparansinya dalam proses pemilihan, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang kandidat dan prosedur yang berlaku serta polarisasi yang terjadi antara kelompok-kelompok pendukung. Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga merambah ke ranah sosial, menyebabkan hubungan antar keluarga dan komunitas menjadi retak. Keterbatasan akses ini dapat memperburuk pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip demokrasi, sehingga menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya memahami mekanisme demokrasi, yang mengakibatkan konflik saat pemilihan kepala desa. Perselisihan yang muncul antara pendukung calon kepala desa yang berbeda menunjukkan ketidakmampuan masyarakat untuk menangani perbedaan pendapat secara dewasa. Ketidakhahaman ini mengarah pada reaksi emosional yang berlebihan, merusak hubungan kekeluargaan, dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Indikasi adanya ketidakjujuran dalam kompetisi politik lebih jauh memperburuk situasi, karena proses pemilihan tidak berjalan secara transparan dan adil.

**Hal ini juga sejalan dengan Teori Weber dalam (Achmad Ridwanto 2014)** menekankan pentingnya legitimasi dan pemahaman masyarakat terhadap struktur kekuasaan. Ketika warga desa tidak memahami prinsip-prinsip demokrasi, mereka cenderung merasa teralienasi dari proses politik, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpuasan.

Kemudian Dahrendorf (Anggraeni Iryawati 2017) menyoroti juga pentingnya konflik sebagai bagian dari dinamika sosial. Dalam konteks Desa Lalubi, perbedaan kepentingan antara pendukung calon kepala desa menciptakan ketegangan yang tidak dapat dihindari. Konflik ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap sistem dan prosedur yang ada, yang perlu diatasi untuk memulihkan keharmonisan sosial.

## **2. Faktor yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan antar warga.**

. Data yang diperoleh, faktor utama penyebab perselisihan di Desa Lalubi merupakan pelantikan kepala desa yang kalah dalam pemilihan yang diputuskan oleh bupati. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati berdasarkan pada hasil putusan sidang sengketa pilkades yang ditemui beberapa pelanggaran dan bukti kecurangan pada saat proses pilkades berlangsung, sehingga Bupati melantik cekades yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan tersebut. Keputusan ini memicu kemarahan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat yang berujung pada aksi demonstrasi.

Menurut Teori Weber dalam (Nuguroho, 2021), bahwa Praktik money politics dan keputusan bupati yang tidak adil mencerminkan kegagalan sistem birokrasi dalam memastikan proses yang adil dan transparan. Weber melihat bahwa birokrasi yang rasional dan terstruktur dapat mencegah terjadinya ketidakadilan dengan menerapkan aturan yang konsisten dan adil dalam pengambilan keputusan.

Hal ini sejalan dengan asumsi dasar dari Teori Dahrendorf (Selvie M. Tumengkol 2012) bahwa Keputusan Bupati dan praktik money politics yang memperburuk ketidakadilan adalah contoh nyata dari konflik antara kelompok dengan kekuasaan dan kepentingan yang berbeda. Dahrendorf melihat bahwa konflik ini adalah hasil dari ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, yang dalam hal ini, mempengaruhi proses pemilihan dan keadilan.

### **3. Adanya perselisihan antara warga mempengaruhi hubungan kekeluargaan di Desa Lalubi.**

Konflik yang timbul dari pemilihan kepala desa telah mempengaruhi hubungan kekeluargaan di Desa Lalubi. Dukungan terhadap calon yang berbeda menciptakan kelompok-kelompok pro dan kontra, menyebabkan ketegangan dalam hubungan antar keluarga. Hubungan kekeluargaan menjadi rusak hal ini mengakibatkan komunikasi terganggu, kecurigaan, dan perpecahan yang merusak keharmonisan sosial. Fenomena ini menandakan bahwa konflik politik dapat mempengaruhi kehidupan sosial secara signifikan, dan perlunya upaya untuk memulihkan hubungan kekeluargaan yang telah retak. Pendekatan untuk merestorasi harmoni sosial menjadi penting untuk mengembalikan keharmonisan di masyarakat.

Menurut Weber dalam (Muhammad Ali 2023) bahwa Konflik dalam hubungan kekeluargaan akibat perselisihan politik mungkin menunjukkan bahwa struktur organisasi dan prosedur yang tidak jelas atau tidak efektif dapat memperburuk ketegangan sosial. Weber menekankan bahwa birokrasi yang baik dapat membantu mengatur dan meredakan konflik dengan mengadopsi aturan yang objektif dan rasional.

Gambaran hasil penelitian ini tergambar dalam pandangan Dahrendorf (Chairul Basrun Umanailo 2019) bahwa Ketegangan dalam hubungan kekeluargaan akibat dukungan yang berbeda untuk calon kepala desa menunjukkan bagaimana konflik dalam arena politik dapat merembet ke tingkat sosial yang lebih personal, seperti hubungan keluarga. Dahrendorf menyatakan bahwa konflik sosial yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan perpecahan dalam kelompok sosial, yang terlihat jelas dalam dampak terhadap hubungan kekeluargaan di Desa Lalubi.

### **4. Penyelesaian Perselisihan/Konflik dampak Pemilihan Kepala Desa.**

Penyelesaian perselisihan memerlukan kesediaan kedua belah pihak untuk mencari solusi yang adil, dukungan dari pihak terkait, dan proses penyelesaian sengketa yang efektif. Mediasi atau negosiasi merupakan metode yang dianjurkan untuk merundingkan kesepakatan bersama dengan prinsip keadilan. Upaya kolaboratif dan dukungan dari pihak-pihak terkait sangat penting untuk mencapai resolusi yang baik dan berkelanjutan. Hal ini menekankan pentingnya proses yang inklusif dan adil dalam menyelesaikan konflik agar semua pihak merasa terwakili dan didengarkan.

Dalam Teori Weber (Endik Hidayat 2018) bahwa Proses penyelesaian yang melibatkan mediasi dan negosiasi memerlukan struktur birokrasi yang jelas untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat secara adil dan sesuai prosedur yang berlaku. Weber melihat bahwa birokrasi yang baik dapat memfasilitasi penyelesaian konflik dengan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan prosedural.

Sejalan dengan pandangan dari Teori Dahrendorf dalam (Mohammad Mulyadi 2015) bahwa Penyelesaian perselisihan yang adil dan inklusif sejalan dengan ide Dahrendorf tentang bagaimana konflik dapat diatasi melalui negosiasi dan mediasi yang melibatkan semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa untuk mencapai resolusi yang stabil, semua kelompok dengan kepentingan berbeda harus didengar dan terlibat dalam proses penyelesaian.

## **5. Jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan.**

Kepala Desa dan BPD Desa Lalubi berfokus pada komunikasi efektif dan terbuka sebagai pendekatan utama untuk menyelesaikan perselisihan. Dengan berkomunikasi secara jujur dan penuh pengertian, mereka berharap dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Pentingnya profesionalitas dan netralitas dalam penyelesaian konflik juga diakui, meskipun ada preferensi pribadi, mereka berusaha tetap objektif dan adil. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa komunikasi yang baik dan sikap netral adalah kunci untuk menyelesaikan konflik dengan adil dan memulihkan hubungan di antara pihak-pihak yang berselisih.

Menurut Teori Weber dalam (Erlangga Agung 2022) bahwa Kepala Desa dan BPD yang berusaha menerapkan komunikasi yang efektif dan netral menunjukkan penerapan prinsip birokrasi yang baik, di mana struktur dan proses administratif dirancang untuk memastikan keadilan dan objektivitas. Weber menekankan pentingnya struktur dan aturan dalam mengelola konflik dan proses administratif dengan cara yang adil dan efisien.

Sejalan dengan itu Teori Dahrendorf (Argyo Demartoto 2010) mengatakan bahwa Kepala Desa dan BPD yang berfokus pada komunikasi efektif dan terbuka untuk menyelesaikan perselisihan adalah cerminan dari upaya untuk mengelola konflik sosial dengan cara yang konstruktif. Ini sejalan dengan pandangan Dahrendorf bahwa pendekatan dialog dan komunikasi yang adil adalah kunci untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan keharmonisan sosial.

Pengamatan dari peneliti bahwa bahwa konflik di Desa Lalubi lebih dari sekadar masalah politik semata. Ini berakar pada pemahaman demokrasi, ketidaktransparanan dalam proses pemilihan, dan keputusan administratif yang kontroversial. Dampaknya tidak hanya merusak hubungan politik antar individu, tetapi juga menghancurkan keharmonisan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Penyelesaian konflik yang adil dan inklusif, dengan menekankan komunikasi yang terbuka dan netralitas, menjadi kunci untuk memulihkan stabilitas sosial dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat dijalankan dengan baik di tingkat desa.

## **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Pemilihan kepala desa pada tahun 2023 di Desa Lalubi mengalami konflik, dan pemicunya adalah calon yang kalah tidak mengakui kekalahan serta mengugat hasil pemilihan, money politik, dan ketidaktransparannya proses pemilihan hingga proses gugatan yang di menangkan oleh salah satu calon yang kalah dan di lantik sebagai kepala desa. Hal ini menyebabkan konflik antara keluarga. Hubungan kekeluargaan menjadi retak, padahal masyarakat desa lalubi secara sosio-kultur dan sebagian besar mereka saling terkait dalam satu ikatan kekeluargaan dengan keluarga lainnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan rekonsiliasi konflik yang berdampak pada kehidupan masyarakat Desa Lalubi agar hubungan kekeluargaan dapat kembali harmonis.

Langkah yang dilakukan oleh masyarakat desa lalubi bersama para tokoh-tokoh lainnya dalam melakukan rekonsiliasi dampak pilkades adalah Para tokoh-tokoh masyarakat berperan untuk melakukan Mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga komunikasi antara semua pihak dapat terjalin. Proses rekonsiliasi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, baik yang pro maupun kontra, untuk membangun kembali kepercayaan dan memperbaiki hubungan yang retak. Mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah

desa, dan lembaga terkait memungkinkan dapat menyelesaikan konflik. Proses yang dilakukan ini berfokus pada negosiasi dan kompromi yang mengarah pada solusi yang dapat diterima semua pihak dan mengedepan kekeluargaan serta solusi yang seadil-adilnya.

## **E. References**

- Arifulloh Achmad 2015. Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Ternate.
- Martin Albrow 2011. Weber Birokrasi, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Lating .Ali 2017. Konflik Sosial Antar Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa. Ternate
- Tuwo Ambo 2023. Konflik Sosial Pasca Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Makassar.
- Andreski. Stanislav 2013. Kapitalisme, Birokrasi, dan Agama. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Ridwanton T. A 2014. Teori Konflik Dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum Vol.5, No.2 Desember 2014: 207–218. ISSN: 2356-4962.
- Rosana. ELlya 2015. Konflik Pada Kehidupan Masyarakat Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern. Al-AdYaN/Vol.X, No.2/Juli-Desember/2015.
- Iryawati L. A 2017. Konflik Sosial Dalam Novel 3 Srikandi Karya Silvarani (Kajian Konflik Ralf Dahrendorf). Universitas Negeri Surabaya. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2017, 0 – 216.
- Putri R. R 2018. Konflik Sosial Dalam Novel Dawuk: Kisah Kelabu Dari Rumbuk Randu Karya Mahfud Ikhwan (Kajian Teori Ralf Dahrendorf. Universitas Negeri Surabaya. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2018.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan\\_kepala\\_desa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan_kepala_desa) (online, diakses pada tanggal 4Oktober2023).
- Santie Yoseph D. A 20223, Penerapan Gaya Kepemimpinan Egaliter Orang Minahasa di UniversitasNegeri Manado. FISH UNIMA. Tondano.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta; Bandung.